

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DAN PEMBATASAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 YANG DILAKUKANOLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh:

NAMA : ENDAS SUTISNA
NPM : E. 1735222989
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI
NEGARA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menempuh Ujian Sidang Proposal
Penelitian Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Sebelas April Sumedang



SEBELAS APRIL

SUMEDANG

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 41
TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DAN
PEMBATASAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DALAM RANGKA
MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG**

Pembimbing I



Dr. Anne Fridav Safaria, S.S., M.Si.
NIDN. 0422037402

Pembimbing II



Hi. FepiFebianti, S.Sos., M.I.Kom
NIDN. 0410028701

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Sebelas April Sumedang



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 0430127102

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NO 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DAN
PEMBATASAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DALAM RANGKA
MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19 YANG DILAKUKAN OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun oleh :

NAMA : ENDAS SUTISNA
NO POKOK : E.1735222989
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

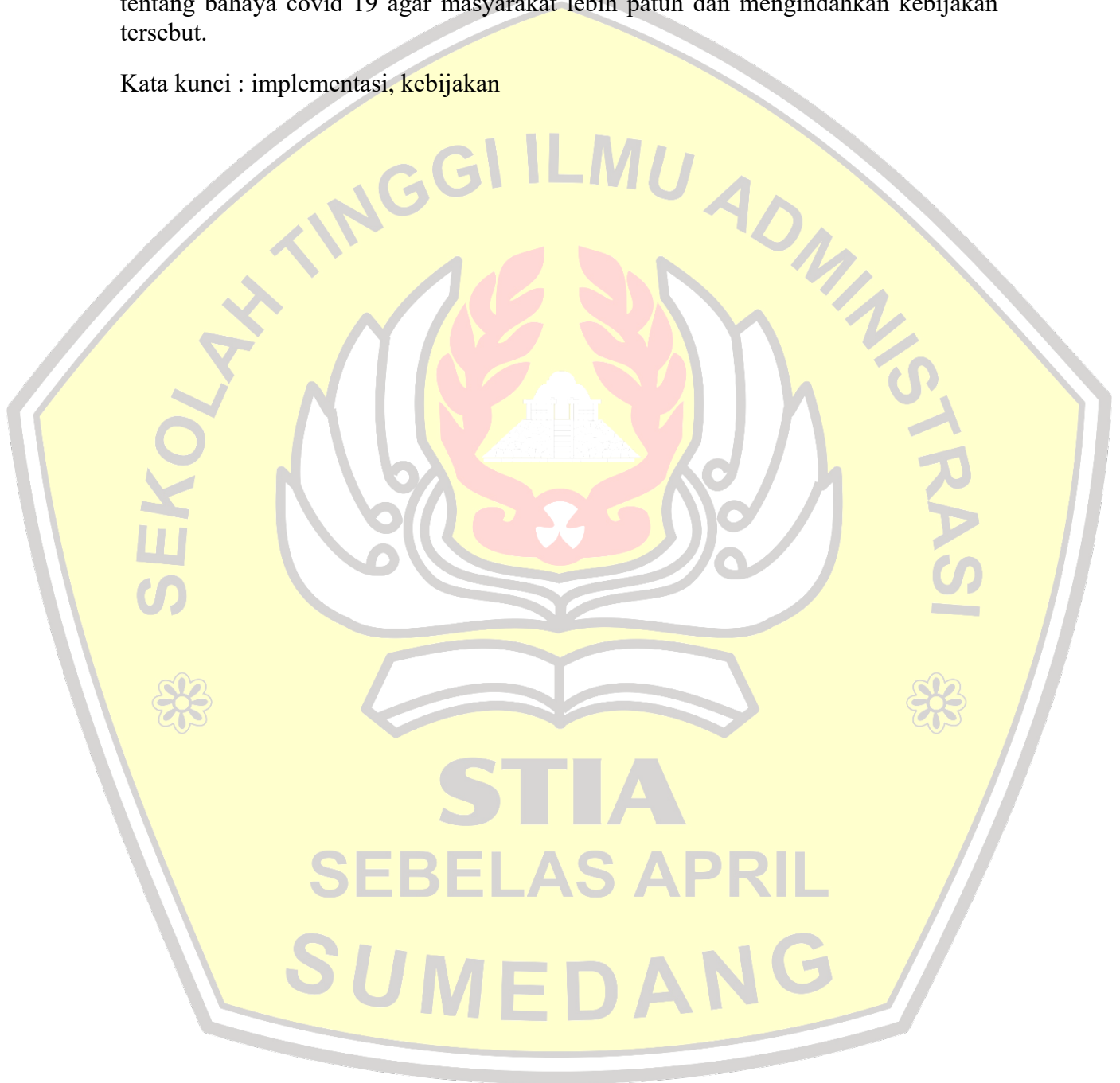
162 halaman, 5 bab, 86 tabel, 4 gambar, 4 lampiran
Daftar pustaka : 20 buku ,4 skripsi ,3 dokumen

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan penelitian , yaitu *purposive sampling*. Dengan informan penelitian, yaitu kepala dinas, sekretariat, bidang teknik fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas, bidang angkutan dan masyarakat pengemudi angkutan umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara prosedur pengolahan data dalam penelitian ini yaitu *data reduction*, *data display*, *data conclusion* *darwing/verification* dan *trianggulasi*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang belum terlaksana secara maksimal, karena Yang pertama sumber daya yang masih kurang memadai, diantaranya kurangnya pegawai, anggaran yang belum cukup memadai, begitupun dengan masih kurangnya respon dan dukungan dari masyarakat. Untuk mengatasi hambatan yang ada. Selaku pelaksana kebijakan seharusnya dapat memberikan pemahaman serta mensosialisasikan program secara maksimal serta melakukan pembinaan secara berulang-ulang agar dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugasnya masing- masing adapun upaya yang dilakukan yaitu Kurangnya pegawai dapat diatasi dengan meningkatkan kompetensi para tiap individu agar pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh dua orang bisa dilakukan oleh satu orang. Anggaran

yang belum cukup memadai dapat diatasi dengan menggandeng pihak pihak swasta atau instansi pemerintah-pemerintah yang lain untuk ikut berkontribusi. Kurangnya dukungan dan respon dari masyarakat dapat diatasi dengan memberikan edukasi tentang bahaya covid 19 agar masyarakat lebih patuh dan mengindahkan kebijakan tersebut.

Kata kunci : implementasi, kebijakan



**ELEMENTARY SCHOOL OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF POLICY REGULATION OF THE MINISTER OF
TRANSPORTATION NO. 41 OF 2020 CONCERNING TRANSPORT
CONTROL AND LIMITATIONS OF PUBLIC TRANSPORT PASSENGER
IN ORDER TO PREVENT THE SPREAD OF COVID 19 PERFORMED BY
THE TRANSPORTATION OFFICE OF SUMEBANG DISTRICT**

COMPLETED BY:

NAME : ENDAS SUTISNA

MAIN NO : E.1735222989

STUDY PROGRAM : STATE ADMINISTRATION SCIENCE

126 pages, 5 chapters, 86 tables, 4 pictures, 4 appendicesbibliography:

20 books, 4 theses, 3 documents

The purpose of this study was to find out the implementation of the policy of the Minister of Transportation Regulation No. 41 of 2020 regarding transportation control and restrictions on general class passengers in order to prevent the spread of Covid 19 carried out by the Sumedang Regency Transportation Service. The research method used in this research is qualitative research method. the technique of determining research informants, namely purposive sampling. with research informants, namely to the office, secretariat, technical field of traffic facilities and infrastructure, transportation sector and public transport drivers. The data collection techniques used are library research and field studies consisting of observations, interviews, and documentation. while the data processing procedures in this research are data reduction, data display, data conclusion drawing/verification and triangulation.

Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the policy of the Minister of Transportation Regulation No. 41 of 2020 regarding transportation control and restrictions on public transport passengers in order to prevent the spread of Covid 19 carried out by the Sumedang Regency Transportation Service has not been carried out optimally, because the first is that the resources are still inadequate. , including the lack of employees, insufficient budget, as well as the lack of response and support from the community. to overcome existing barriers. as the implementer of the policy should be able to provide understanding and socialize the program to the maximum and carry out coaching repeatedly so that in carrying out a job in accordance with the regulations that guide the implementation of their duties. each of the efforts made, namely the lack of employees can be overcome by increasing the competence of each individual so that the work that should be done by two people can be done by one person. an inadequate budget can be overcome by cooperating with the private sector or other government agencies to contribute. the lack of support and response from the community can be overcome by providing

education about the dangers of covid 19 so that people are more aware and heed the policy.

Keywords: policy, implementation.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian dengan judul *“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang ”* tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh seminar usulan proposal penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis banyak menerima bimbingan, pengarahan, dukungan moril dan materi, motivasi serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si selaku Ketua STIA Sebelas April Sumedang.
2. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Ketua I STIA Sebelas April Sumedang.
3. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd. selaku Pembantu Ketua II STIA Sebelas April Sumedang.
4. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si selaku Pembantu Ketua III STIA Sebelas April Sumedang.
5. Ibu Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si K.A Prodi STIA Sebelas April Sumedang.
6. Ibu Dr. Anne Friday Safaria, S.S., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan proposal penelitian.
7. Ibu Hj. Fepi Febianti, M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan proposal penelitian.
8. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang yang telah membekali ilmu kepada kami selama perkuliahan.

9. Seluruh Staf Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.

10. Seluruh pegawai Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan proposal penelitian ini.

11. Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa memberikan do'a, motivasi kepada penulis selama penulisan proposal penelitian ini.

12. Teman-teman yang telah selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian ini. Oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun akan penulis terima dengan baik. Semoga proposal penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Sumedang, Maret 2021

Penulis

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Administrasi	9
1. Pengertian Administrasi	9
2. Unsur-Unsur Administrasi.....	10
3. Pengertian Administrasi Negara.....	12
4. Fungsi Administrasi Negara	13
5. Ruang Lingkup Administrasi Negara	14
6. Kaitan Administrasi Dengan Variabel Penelitian	15
B. Kebijakan Publik	17
1. Pengertian Kebijakan Publik	17
2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik.....	19
3. Proses Kebijakan Publik	21

C.	Implementasi Kebijakan	22
1.	Pengertian Implementasi Kebijakan	22
2.	Unsur- Unsur Implemetasi Kebijakan	23
3.	Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan	24
4.	Model-Model Implementasi Kebijakan	25
5.	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	28
6.	Upaya Mengatasi Hamabatan Implementasi Kebijakan	30
7.	Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tahun 2020	33
D.	Kajian Penelitian Terdahulu	33
E.	Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Desain Penelitian.....	41
B.	Penentuan Sasaran, Informan dan Narasumber Penelitian	44
1.	Sasaran penelitian	44
2.	Informan penelitian	45
C.	Teknik pengumpulan data	46
D.	Prosedur pengolahan data	47
E.	Lokasi dan jadwal penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Objek Penelitian	50
1.	Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.....	50
2.	Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang	50
3.	Strategi Dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.....	51
4.	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.....	52
5.	Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.....	53
B.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	71

A. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang?.....	72
B. Apa saja hambatan implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang?.....	102
C. Apa saja upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang?.....	133
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Kajian Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	40
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	47
Tabel 3.2 Informan Penelitian	49
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	52
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Kelompok Umur	66
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Golongan	67
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Tingkat Pendidikan	68
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jabatan	69
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin	70
Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin	70
Tabel 4.7 Hasil Wawancara Item No 1 Tentang Transmisi	74
Tabel 4.8 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Transmisi	75
Tabel 4.9 Hasil Wawancara Item No 2 Konsistensi	77
Tabel 4.10 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Konsistensi	77
Tabel 4.11 Hasil Wawancara Item No 3 Kejelasan	79
Tabel 4.12 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Kejelasan	80
Tabel 4.13 Hasil Wawancara Item No 4 Kompetensi Implementor	82
Tabel 4.14 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Kompetensi Implementor	83

Tabel 4.15 Hasil Wawancara Item No 5 Informasi	84
Tabel 4.16 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Informasi	85
Tabel 4.17 Hasil Wawancara Item No 6 Sumber Daya Finansial	86
Tabel 4.18 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Sumber Daya Finansial	87
Tabel 4.19 Hasil Wawancara Item No 7 Komitmen.....	89
Tabel 4.20 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Komitmen.....	90
Tabel 4.21 Hasil Wawancara Item No 8 Tanggungjawab	91
Tabel 4.22 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Tanggungjawab	92
Tabel 4.23 Hasil Wawancara Item No 9 Ketulusan	93
Tabel 4.24 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Ketulusan.....	94
Tabel 4.25 Hasil Wawancara Item No 10 SOP	95
Tabel 4.26 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang SOP.....	96
Tabel 4.27 Hasil Wawancara Item No 11 Fragmentasi.....	97
Tabel 4.28 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Fragmentasi	98
Tabel 4.29 Hasil Wawancara Item No 12 Pengawasan	99
Tabel 4.30 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Pengawasan	100
Tabel 4.31 Rekapitulasi hasil wawancara.....	101
Tabel 4.32 Hasil Wawancara Item No 13 Ketidakjelasan Tujuan Kebijakan	104
Tabel 4.33 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Ketidakjelasan Tujuan Kebijakan	105

Tabel 4.34 Hasil Wawancara Item No 14 Masih Kurangnya	
Sumber Daya Finansial	106
Tabel 4.35 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang Masih	
Kurangnya Sumber Daya Finansial	107
Tabel 4.36 Hasil Wawancara Item No 15 Kurangnya Kecukupan	
Waktu	109
Tabel 4.37 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kurangnya Kecukupan Waktu	110
Tabel 4.38 Hasil Wawancara Item No 16 Kurangnya Respon	
Pimpinan	112
Tabel 4.39 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kurangnya Respon Pimpinan	113
Tabel 4.40 Hasil Wawancara Item No 17 Kurangnya Ketepatan	
Waktu	114
Tabel 4.41 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kurangnya Ketepatan Waktu	115
Tabel 4.42 Hasil Wawancara Item No 18 Kurang Akuratnya	
Penyampaian Informasi	116
Tabel 4.43 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kurang Akuratnya Penyampaian Informasi	117
Tabel 4.44 Hasil Wawancara Item No 19 Kurangnya Dukungan	
Dari Masyarakat	119
Tabel 4.45 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kurangnya Dukungan Dari Masyarakat	119
Tabel 4.46 Hasil Wawancara Item No 20 Kurangnya Fasilitas	121
Tabel 4.47 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kurangnya Fasilitas	122
Tabel 4.48 Hasil Wawancara Item No 21 Kurangnya Dukungan	
Dari Pemerintah	123

Tabel 4.49 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kuranganya Dukungan Dari Pemerintah.....	124
Tabel 4.50 Hasil Wawancara Item No 22 Ketidaksesuaian	
Penempatan Pekerjaan	126
Tabel 4.51 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Ketidaksesuaian Penempatan Pekerjaan.....	127
Tabel 4.52 Hasil Wawancara Item No 23 Kurang Sesuainya Dalam	
Pembagian Tugas	128
Tabel 4.53 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kurang Sesuainya Dalam Pembagian Tugas	129
Tabel 4.54 Hasil Wawancara Item No 24 Ketidaksesuaian Beban	
Kerja Yang Diberikan	131
Tabel 4.55 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Ketidaksesuaian Beban Kerja Yang Kerja Yang	
Diberikan	131
Tabel 4.56 rekapitulasi hasil wawancara dan observasi	132
Tabel 4.57 Hasil Wawancara Item No 25 Kejelasan Tujuan	
Kebijakan	136
Tabel 4.58 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kejelasan Tujuan Kebijakan.....	136
Tabel 4.59 Hasil Wawancara Item No 26 Mengefektifkan Sumber	
Daya Financial Yang Ada.....	138
Tabel 4.60 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Mengefektifkan Sumber Daya Financial	139
Tabel 4.61 Hasil Wawancara Item No 27 Mengefektifkan Waktu	140
Tabel 4.62 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Mengefektifkan Waktu	141
Tabel 4.63 Hasil Wawancara Item No 28 Kejelasan Respon	
Pimpinan	142

Tabel 4.64 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Kejelasan Respon Pimpinan	143
Tabel 4.65 Hasil Wawancara Item No 29 Mengepektifkan Waktu.....	144
Tabel 4.66 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Mengepektifkan Waktu.....	145
Tabel 4.67 Hasil Wawancara Item No 30 Meningkatkan Sosialisasi	
Kepada Kelompok Sasaran	146
Tabel 4.68 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Meningkatkan Sosialisasi Kepada Kelompok Sasaran.....	147
Tabel 4.69 Hasil Wawancara Item No 31 Meningkatkan Dukungan	
Dari Pemerintah	148
Tabel 4.70 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Meningkatkan Dukungan Dari Pemerintah	149
Tabel 4.71 Hasil Wawancara Item No 32 Mengepektifkan Fasilitas	
Yang Ada	150
Tabel 4.72 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Mengepektifkan Fasilitas Yang Ada.....	151
Tabel 4.73 Hasil Wawancara Item No 33 Meningkatkan Dukungan	
Dari Pemerintah	153
Tabel 4.74 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Meningkatkan Dukungan Dari Pemerintah	153
Tabel 4.75 Hasil Wawancara Item No 34 Menyesuaikan	
Penempatan Pekerjaan	155
Tabel 4.76 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Menyesuiakan Penempatan Pekerjaan.....	155
Tabel 4.77 Hasil Wawancara Item No 35 Mengoptimalkan	
Pembagian Tugas	157
Tabel 4.78 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang	
Mengoptimalkan Pembagian Tugas	157

Tabel 4.79 Hasil Wawancara Item No 36 Menyesuaikan Beban

Kerja..... 159

Tabel 4.80 Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Tentang

Menyesuaikan Beban Kerja 159

Tabel 4.81 rekapitulasi hasil wawancara dan observasi 160



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1 Zona covid 19.....	4
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	39
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	46
Gambar 3.2 Teknik Pengolahan Data	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	53



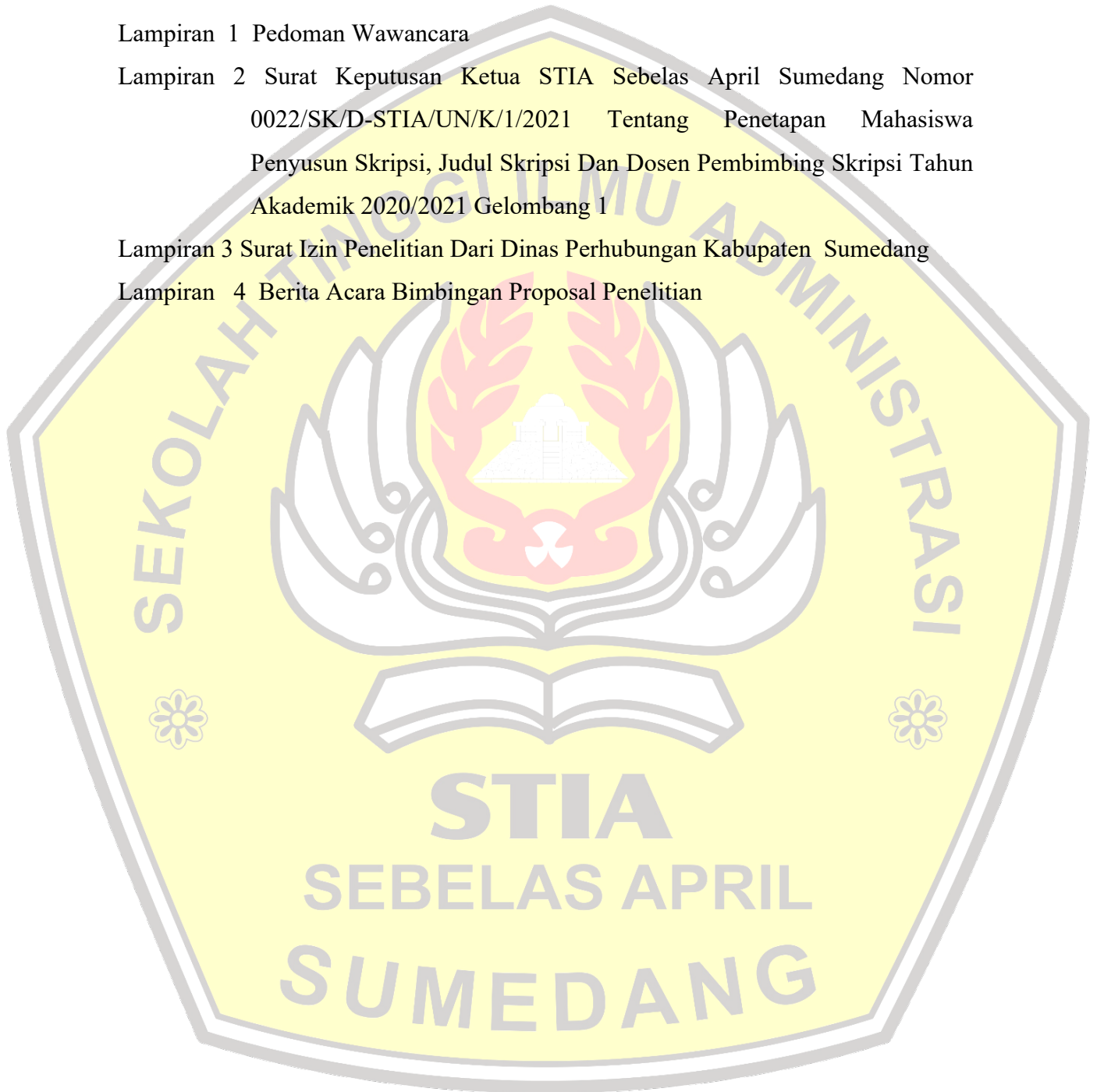
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor 0022/SK/D-STIA/UN/K/1/2021 Tentang Penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi, Judul Skripsi Dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2020/2021 Gelombang 1

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

Lampiran 4 Berita Acara Bimbingan Proposal Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang bahwa Dinas Perhubungan mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Perhubungan Sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sebagai Instansi Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga berdasarkan Rencana Kerja Tahunan.

Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak yang berpengaruh secara merata di berbagai aspek kehidupan, salah satu dampak yang terasa pada penurunan pergerakan moda transportasi. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat suatu keputusan dengan adanya sistem sosial baru yaitu *sosial distancing* maupun *physical distancing*, dan ditindak lanjuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Maka menteri perhubungan mengeluarkan peraturan No 41 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dan

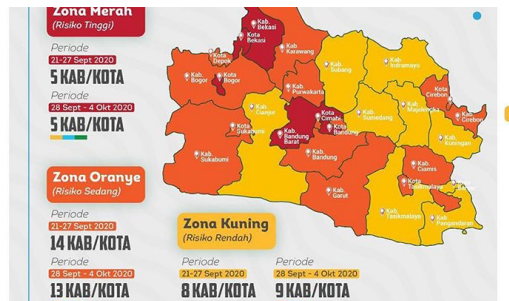
pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid- 19.

Sesuai dengan Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19. Kemudian dalam rangka mensinkronkan dan mengintegrasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka pemerintahan kabupaten sumedang mengeluarkan peraturan bupati no 40 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019. Maka dinas perhubungan berkewajiban untuk meningkatkan pengendalian transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *corona virus disease* 2019. Hal tersebut Karena moda transportasi menjadi salah satu alat penunjang masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas sosial ataupun ekonomi.

Secara umum pergerakan moda transportasi digunakan sebagai alat pendukung, sarana dan prasarana memudahkan manusia dalam *mobilitas* , berpindah dari satu tempat ketempat lain untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi menjadi parameter utama dengan maraknya pembangunan kota besar di indonesia karena sektor transpotasi dan perencanaan transportasi, salah satu yang sangat berperan untuk suatu pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. Selain itu komponennya tidak dapat dipisahkan dari sebuah perencanaan membangun sebuah kota. Jika suatu pergerakan moda transportasi berhenti, tentu akan menimbulkan berbagai dampak lain terutama akan

terganggunya aktifitas dibidang sosial dan juga rantai perekonomian suatu masyarakat.

Semakin maraknya penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia, terjadi peningkatan angka pada jumlah orang yang positif. Hal tersebut juga dibarengi dengan jumlah kematian dari pasien yang terinfeksi semakin meningkat. Penyebaran yang sangat cepat membuat hampir setiap kota di Indonesia terdapat pasien dalam penanganan (PDP) yang positif Covid-19. Pemerintah Indonesia bertindak cepat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan membatasi ruang gerak publik seperti penutupan akses ke luar negeri, penerapan sistem *social distancing*, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), penerapan *work from home* (WFH), dan mengurangi armada transportasi publik. Kebijakan ini untuk membatasi pergerakan barang dan manusia, seperti pembatasan jumlah penumpang dalam setiap kendaraan, pembatasan aktivitas ojek online, tidak diperbolehkan melakukan perkumpulan dengan lebih dari lima orang, mewajibkan pemakaian masker diluar rumah, pelarangan untuk pulang kampung, pemberlakuan jam malam serta bagi pelaku usaha tempat makan atau usaha sejenisnya untuk memberlakukan layanan tidak diperbolehkan makan ditempat dan dianjurkan melakukan pembelian melalui pengantaran online. Setelah penerapan PSBB di DKI Jakarta, daerah lainnya juga mulai menerapkan PSBB, seperti di Bogor, Depok, Bekasi dan juga termasuk Sumedang.



Gambar 1.1
Peta Zona Penyebaran Covid 19 Di Jawabarat 2020

Berdasarkan grafik diatas kondisi kabupaten sumedang yang sempat mengalami zona oren yang artinya kabupaten sumedang sedang berada dengan status siaga maka peraturan kebijakan ini diharapkan penerapan PSBB ini dapat efektif dalam memutus penyebaran mata rantai virus Covid-19. Karena moda transportasi menjadi salah satu utama maraknya penyebaran covid 19 diwilayah kabupaten sumedang.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti, dan dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19, ditemukan adanya permasalahan program kebijakan publik yang masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikasi-indikasi masalah sebagai berikut.

1. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan menteri perhubungan tentang pembatasan bagi penumpang angkutan umum kepada masyarakat serta para supir angkutan umum terbukti dengan masih banyaknya angkutan umum yang membawa penumpang dari batas yang telah ditentukan.

2. Masih rendahnya ketersediaan anggaran untuk mendukung proses sosialisasi karena anggaran yang dari pemerintah menurun sebab di pakai untuk penanggulangan bencana covid-19
3. Penyedia transportasi belum mengetahui pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat seperti melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dalam kendaraan, membatasi jumlah orang paling banyak 50% dari kapasitas kendaraan, menerapkan *physical distancing* dalam kendaraan dan tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk pilek, diare, dan sesak nafas.
4. Kurangnya sosialisasi tentang sanksi administratif terhadap pengoprasian angkutan umum yang melanggar pembatasan sosial. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud adalah berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin atau denda administratif.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya covid 19. Hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang masih menggunakan angkutan umum sebagai sarana transpotasinya. Hal tersebut dapat mempercepat penyebaran covid 19.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMETASI KEBIJAKAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 41 TAHUN 2020 TETANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DAN PEMBATAHAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DALAM**

RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19 YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG ”

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah diuraikan diatas , maka pertanyaan yang muncul dalam penelitianini yaitu:

1. Bagaimana Implemetasi Kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tetang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tetang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tetang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokus permasalahan diatas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan implementasi kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya dari mengatasi hambatan implementasi kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan guna dan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis.

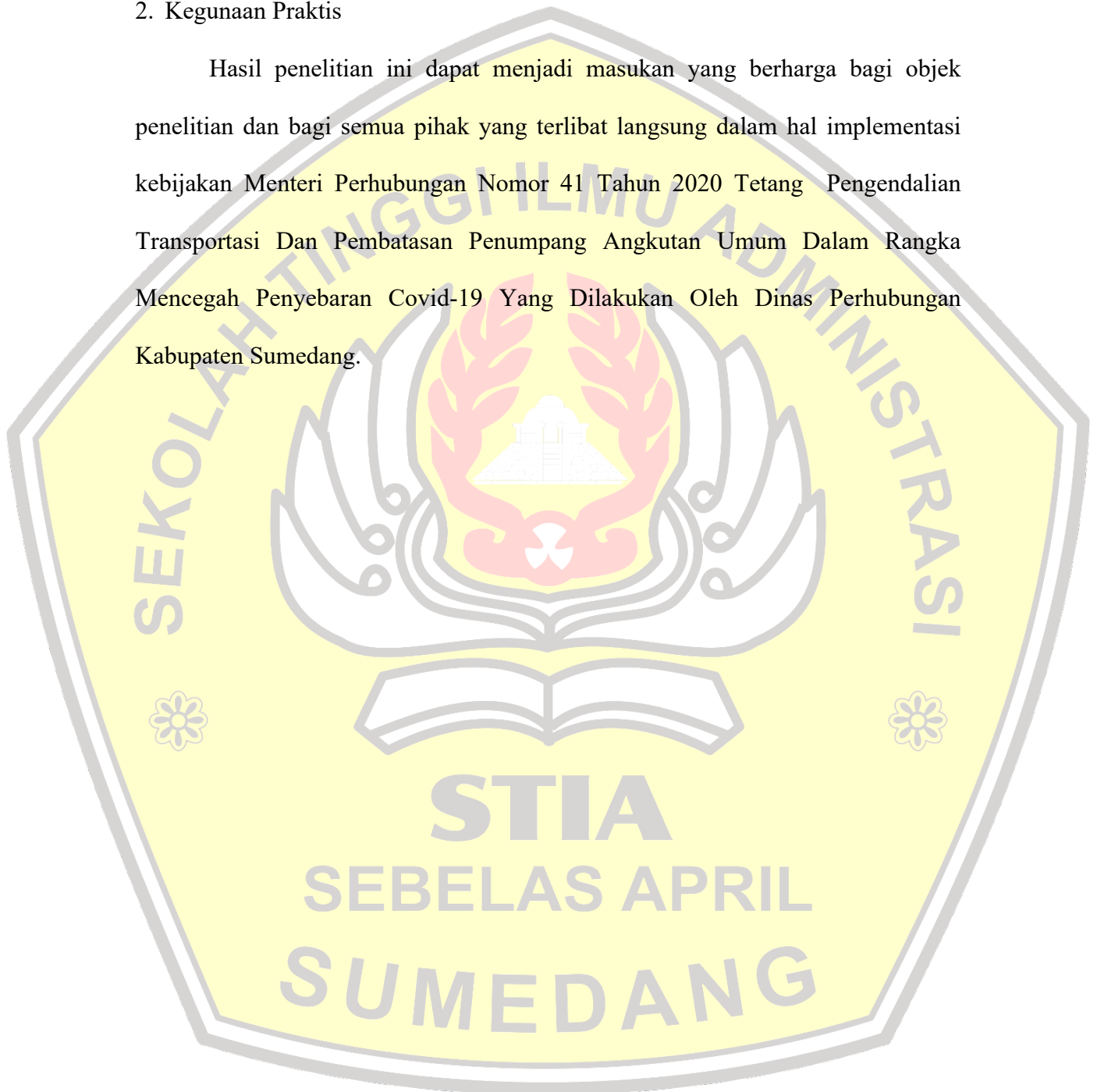
1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kontribusi bagi pengembangan konsep-konsep dan teori teori ilmu administrasi negara dan manajemen pemerintah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal yang mengenai implementasi kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum

Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi objek penelitian dan bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam hal implementasi kebijakan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. dalam *oxford advance learner's dictionary english* (1974), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) *to direct* (menggerakan).

Perkembangan penggunaan istilah dan pengertian administrasi di Indonesia juga masih menunjukkan ketidaksamaan pandangan atau pendapat. Di satu pihak (dalam arti sempit) administrasi diartikan sebagai tatausaha dan di lain pihak (dalam arti luas) administrasi diartikan sebagai kegiatan pengelolaan *human resources* dan *material resources* termasuk pengelolaan informasi atau kegiatan tata usaha. beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi.

Wajong (Indradi, 2016 : 2) mengemukakan bahwa kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan.

Adapun pengertian administrasi yang dikemukakan oleh Westra (Indradi, 2016 : 4) yaitu :

Administrasi berarti penyusunan setiap keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain”

Selain itu, menurut Silalahi (2020: 7), administrasi merupakan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian

kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian administrasi secara luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Unsur-unsur Administrasi

Dalam proses administrasi maka diperlukan bagian-bagian lain sebagai penunjang mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bagian-bagian tersebut dikatakan sebagai unsur-unsur administrasi. Menurut Fathoni (2006: 3-5), hakikat administrasi yaitu adanya aktivitas sekelompok manusia yang mencakup aspek-aspek determinan sebagai berikut:

- a. Manajemen, proses kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Organisasi, proses kegiatan ditata/diatur menurut sifat, bidang, jenis urgensinya, kegiatan selaku pimpinan, bantuan staf, maupun pelaksana operasional. Proses kegiatan tersebut merupakan sistem usaha kerjasama kelompok manusia secara rasional untuk mencapai tujuan.
- c. Komunikasi, adanya hubungan interaksi, koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- d. Kepegawaian, pengaturan anggota organisasi, yaitu proses perencanaan formasi penyingkiran maupun pemberhentian.
- e. Perlengkapan, proses pengadaan perbekalan, penggunaan alat, perawatan sampai pada penghapusan inventaris.
- f. Keuangan. Proses kegiatan yang berhubungan dengan uang, kertas berharga yang dilakukan antara lain oleh juru bayar, bendaharawan, otorisator maupun aktivitas lainnya yang berhubungan dengan uang.
- g. Sekretariat, proses kegiatan yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat atau sekertaris sebagai staf yang mencakup fungsi pelayanan termasuk tata usaha.

- h. Lingkungan, keadaan luar yang mempengaruhi organisme baik lingkungan bersifat internal maupun eksternal, bahkan hubungannya dengan pengaruh globalisasi.

Anggara (2012:29) mengemukakan bahwa dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan satu dan yang lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
- b. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja. Hubungan ini meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, pengorganisasian, pengawasan, dan penyempurnaan juga perbaikan tata struktur dan tata kerja.
- c. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikir dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
- d. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai yang diperlukan.
- e. Keuangan, yaitu pengelolaan dari segi pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan.
- f. Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian.
- g. Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.
- h. Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.

Menurut The Liang Gie (2016:17) administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur: pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha dan perwakilan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian, rangkaian pembuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Manajemen, rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.

- c. Tata hubungan, rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama.
- d. Kepegawaian, rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
- e. Keuangan, rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama.
- f. Perbekalan, rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerja sama.
- g. Tata usaha, rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
- h. Perwakilan, rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama yang dilakukan.

Berdasarkan ketiga uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur administrasi itu terdiri dari delapan unsur yang mencakup pengorganisasian, manajemen, komunikasi atau tata hubungan, mengenai kepegawaian, keuangan, perbekalan yang termasuk perlengkapan, tata usaha atau lebih singkatnya yaitu sekretariat, dan suatu hubungan yang mencakup lingkungan sekitar termasuk masyarakat.

3. Pengertian Administrasi Negara

Dalam aktualisasinya administrasi dapat dilakukan terhadap berbagai bidang kegiatan, sehingga lahir konsep-konsep lain seperti administrasi publik atau administrasi negara. konsep administrasi publik juga dikemukakan oleh para pakar melalui pernyataan yang beraneka ragam.

Menurut Gordon (Indradi, 2016: 108) mengemukakan bahwa “administrasi negara merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan”.

Menurut Starling (Indradi,2016:107) mengemukakan bahwa administrasi negara adalah semua yang dicapai pemerintah, yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan”.

Sedangkan menurut Abdurrachman (Indradi,2016 :108) menyebutkan administrasi negara, yaitu ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu aktifitas para pejabat politik atau pejabat negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum sesuai dengan hak dan kewenangan politiknya.

4. Fungsi Administrasi Negara

Dalam paradigma administrasi negara ini tumbuh keyakinan bahwa ada fungsi-fungsi administrasi yang berlaku secara universal yang dikembangkan untuk menggambarkan aktivitas manajer yang pada umumnya ditemui pada semua organisasi yakni terdapat tujuh fungsi administrasi negara menurut Gullick dan Urwick (Mufiz, 2011: 28) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat apa yang harus dikerjakan dan metode-metode untuk melaksanakannya, dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang di rancang untuk membentuk pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
3. Penyediaan staf
Penyediaan staf adalah pergerakan dan latihan sekelompok orang untuk mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan.
4. Pengarahan

Pengarahan adalah struktur yang menetapkan pembagian tugas bagi setiap individu dalam organisasi, namun tidak dengan kondisinya organisasi dapat bekerja.

5. pengorganisasian
pengorganisasian adalah untuk menghubungkan-hubungkan berbagai bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi.
6. Pelaporan
Pelaporan adalah fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja.
7. Penganggaran
Penganggaran sebagai pengendalian organisasi melalui perencanaan fiscal dan akuntansi, urusan-urusan keuangan dalam bidang pemerintahan diarah pada pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan administrasi negara meliputi fungsi-fungsi administrasi yang harus dilaksanakan dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,yaitu perencanaan,pengorganisasian, penyediaan staff, pelaporan, penganggaran.

5. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Dalam suatu administrasi negara terdapat beberapa ciri-ciri yang dikemukakan di sini bukanlah bermaksud untuk memberikan batas yang sempit dari disiplin administasi negara, melainkan untuk lebih mengenalnya agar supaya diperoleh pemahaman yang komprehensif.

Salah satu persoalan dalam beberapa paradigma administrasi negara seperti yang telah diuraikan dimuka ialah adanya usaha untuk membedakan antara negara(*public*) dalam istilah administrasi negara dengan swasta atau perusahaan (*private organization*). ada sementara pihak yang menyatakan bahwa keduanya sulit dibedakan, dan ada pula yang menyatakan bahwa keduanya bisa dibedakan. penggunaan istilah negara dalam administrasi negara memberikan kesan seakan-akan administrasi negara tersebut tidak mencampuri urusan-urusan swasta.

barangkali kalau diketahui ciri-ciri dari administrasi negara, maka persoalan tersebut akan bisa dijawab. Menurut Henry (Anggara 2018:74) ciri-ciri tersebut adalah :

1. Kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*), titik tekanannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara negara dan masyarakat bersifat pasti.
2. Monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya. negara memiliki kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum, kekuasaan untuk melaksanakan paksaan dipahami sebagai *coercive power*, administrasi negara merupakan penjelmaan dari hal tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, kehakiman dan lainnya.
3. Prioritas, administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat sehingga memiliki prioritas dalam memberikan arahan ataupun layanan.
4. Ukuran yang tidak terbatas, lingkup masyarakat dinegara meliputi batasan teritorial suatu negara, yang didalamnya terdapat administrasi negara.

6. Kaitan Administrasi Dengan Variabel Penelitian

Studi tentang pelaksanaan kebijakan publik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau mempunyai keterkaitan dengan administrasi negara.

Adanya definisi administrasi negara mengalami revisi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik menurut para ahli, sebagian diantaranya akan dituangkan oleh peneliti.

Definisi administrasi negara yang mengalami revisi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh Gordon (Indradi, 2016: 108) mengemukakan bahwa “administrasi negara merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan”.

Menurut Starling (Indradi, 2016: 107) mengemukakan bahwa administrasi negara adalah semua yang dicapai pemerintah, yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan”.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa birokrasi lembaga legislatif, lembaga peradilan merupakan badan atau lembaga administrasi negara dan merupakan aktor yang terlibat sebagai badan atau lembaga yang merumuskan kebijakan maupun sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut.

Pendapat diatas semakin memperjelas pemahaman peneliti bahwa pelaksana kebijakan memiliki keterkaitan atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan administrasi negara, karena orang-orang yang berada didalam suatu organisasi pemerintah atau para administrator negara merupakan orang-orang yang harus merumuskan dan mengimplementasikan atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh para administrator tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu ilmu yang luas, dalam kajian ilmu administrasi negara banyak menyangkut dan mempelajari kebijakan publik baik itu pelaksanaannya maupun perumusannya yang dilakukan oleh para administrator negara. pelaksanaan kebijakan dijalankan oleh para pelaku administrasi negara untuk mengatasi ataupun mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dengan memberlakukan kebijakan politik untuk dirumuskan sekaligus dilaksanakan.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum penulis lebih jauh memaparkan tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, terlebih dahulu penulis kengemukakan definisi kebijakan publik menurut para ahli.

Menurut Anderson (Winarno, 2012:21) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Sedangkan menurut Friedrich (Winarno, 2012:20) menyatakan bahwa:

kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan- hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Rose (Winarno, 2012:20) menyatakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Dari definisi ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu proses yang mencakup tahap implementasi atau pelaksanaan yang mempunyai arah dan tujuan. kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang

diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada didalam masyarakat. apabila kebijakan tersebut berisi nilai –nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. sebaliknya suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Secara termologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali , tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup baerbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Selain itu jika dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, persturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/ kota,dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2011: 93) mendefinisikan bahwa "kebijakkan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuantujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*)".

Sedangkan, menurut Friedrick (Nugroho, 2011: 93) menyatakan bahwa:

kebijakkan publik merupaka serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. kebijakkan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan.

Selanjutnya, Dye (Nugroho, 2011: 94) mengemukakan bahwa "kebijakkan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan berasa tampil berbeda (*what goverment do, why they do it, and what difference it makes*)".

Sedangkan menurut Eyestone (Winarno, 2012: 20) ,menyatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau publik dan juga aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah ataupun kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat pelaksanaan dari adanya permenhub no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ruang lingkup cakupan dalam suatu kebijakan publik berkaitan dengan jenis-jenis kebijakan publik tersebut. Anderson dalam Anggara (2014: 55) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

a. *Substantive and Procedural Policies*

Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Sedangkan *procedural policy* adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholder*).

b. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, kelompok atau perusahaan. Kemudian *redistributive policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau

hak-hak. Sedangkan *regulatory policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan.

c. *Material policy*

Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. *Public Goals and Private Goods Policies*

Public goals policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Kemudian *private goods policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Kemudian Dye dalam Taufiqurokhman (2014: 22) mengemukakan bahwa kebijakan publik yang dilihat sebagai suatu sistem terdiri dari input, konversi, dan output. Dalam konteks ini variabel makro yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu lingkungan domestik dan lingkungan internasional.

Selanjutnya Taufiqurokhman (2014: 20) mengemukakan bahwa ada tiga elemen yang terlibat dalam sebuah kebijakan, yakni:

- a. Pelaku kebijakan;
- b. Lingkungan kebijakan; dan
- c. Kebijakan publik itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kebijakan publik yaitu bagaimana input atau masukan berupa masalah publik yang sedang terjadi yang kemudian dikonversikan oleh pelaku kebijakan ke dalam suatu kebijakan publik yang di mana outputnya atau keluarannya itu berupa kebijakan publik yang ditetapkan baik secara hukumnya maupun tujuannya.

3. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik memerlukan proses untuk pencapaian menuju tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses dalam rangka memecahkan suatu masalah-masalah publik menurut Dunn dalam Anggara (2014: 49) antara lain:

- a. Penetapan agenda kebijakan dalam perumusan masalah;
- b. Memformulasikan kebijakan dalam suatu peramalan dalam kebijakan;
- c. Adopsi kebijakan yang telah direkomendasikan dari formulasi kebijakannya;
- d. Mengimplementasikan kebijakan yang tidak terlepas dari pemantauan; dan
- e. Evaluasi kebijakan sebagai penilaian kebijakan.

Subarsono (2004: 8) mengemukakan bahwa:

Proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan.

Kemudian Anderson dalam Pasolong (2019: 49) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah;
- b. Formulasi kebijakan;
- c. Penentuan kebijakan;
- d. Implementasi kebijakan; dan
- e. Evaluasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, proses dalam kebijakan publik yang paling utama yaitu bagaimana pelaku kebijakan memformulasikan kebijakan agar ditetapkan menjadi sebuah agenda kebijakan yang kemudian akan diimplementasikan lalu di evaluasi bagaimana baik atau buruknya kebijakan tersebut untuk menjadikan suatu penilaian apakah kebijakan publik tersebut sudah tepat dalam pemecahan masalah yang ada atau perlu diganti dengan kebijakan yang lain.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012: 148) menyatakan bahwa "implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible*)".

Selanjutnya, menurut Grindle (Winarno, 2012: 149) mengemukakan bahwa "implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah".

Sedangkan, menurut Winarno (2012: 146) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kemudian, menurut Meter dan Horn (Winarno, 2012: 149) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dari definisi di atas, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari sebuah proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Ada beberapa unsur-unsur dalam implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Tachjan (2006: 26), yang mutlak harus ada yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur pelaksana;
- b. Adanya program yang dilaksanakan; dan
- c. Target grup atau kelompok sasaran.

Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan menurut Wahab (2017: 45) meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran yang diharapkan apa menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Meter dan Horn (Winarno, 2012: 471) menyebutkan bahwa terdapat beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu:

- a. Kompetisi dan ukuran staf suatu badan;
- b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- d. Vitalitas suatu organisasi
- e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

Berdasarkan ketiga pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam implementasi kebijakan merupakan hal-hal yang sangat penting yang perlu ada dalam proses implementasi kebijakan. Adanya unsur-unsur implementasi kebijakan tersebut maka dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan agar pembuat kebijakan dan target dari kebijakan tersebut dapat menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka perlu adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. menurut Vinning (Nugroho, 2014:307) mengatakan bahwa proses analisis kebijakan terdiri atas 2 tahap utama yaitu analisis masalah dan analisis solusi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *understanding the problem*, yang mencakup kegiatan
 - a. *receiving the problem : assesing symptoms*
 - b. *framing the problem : analyzing market dan goverment failure.*
 - c. *modeling the problem : identifying policy variables*
2. *choosing and explaining relevant goals and constraints.*
3. *selecting a solution method*

Sedangkan menurut Hogwood dan Gun (Nughroho, 2014 : 243) dalam buku "*analisis kebijakan : dari formulasi keimplementasi kebijakan negara*" mengemukakan sejumlah implementasi sebagai berikut :

Tahap 1 terdiri atas kegiatan -kegiatan :

- a. menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur, staff, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan :

1. Menentukan jadwal .
2. Melaksanakan pemantauan.
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dan segera.

Jadi implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang terjadi sesudah suatu program diperlakukan atau dirumuskan yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha administratif maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi pada perilaku lembaga – lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran, tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi. Sosial, yang berpengaruh kepada implementasi kebijakan negara.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% adalah bagaimana kita bisa mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Ada beberapa model implementasi kebijakan dari para ahli yang dapat penulis kemukakan dan selanjutnya penulis uraikan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian yang sedang dilakukan.

Model yang dikembangkan oleh Edward III (Winarno:2012) mengatakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. dikatakan nya, *without effective implementation the decision of*

polycymakers will not be caried out succesfully. edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif , yaitu sebagai berikut.

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resource* (Sumber Daya)
3. *Disposition Or Attitude* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Stucturees* (Strukture Birokrasi)

Keberhasilan sebuah implentasi kebijakan menurut Edward dipengaruhi oleh faktor –faktor diatas. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi berkenaan dengan keinginan kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi komunikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Transmisi artinya harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat.
- b. Konsistensi artinya perintah –perintah harus konsisten dan jelas.
- c. Kejelasan artinya intruksi-intruksi yang di berikan kepada pelaksana harus jelas tidak boleh kabur agar para pelaksana paham harus kapan dan bagaimana perintah itu dilaksanakan.

b. *Resource* (Sumber Daya)

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung khususnya sumber daya manusia. hal ini berkenaan dengan kecakapan kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. meskipun isi kebijakan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi sumber daya yaitu sebagai berikut :

- a. Kompetensi implementor yaitu, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Informasi yaitu tentang bagaimana cara melaksanakan kegiatan dan informasi tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan.
- c. Sumber daya financial/ fasilitas yaitu, saham atau obligasi yang dimiliki sebuah perusahaan.

c. *Disposition Or Attitude* (Disposisi)

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. disposisi sering di artikan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan vbaik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi disposisi yaitu sebagai berikut :

- a. Komitmen yaitu, suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian atau keterkaitan baik diri sendiri dan orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela ataupun terpaksa.
- b. Bertanggung jawab yaitu, kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja
- c. Ketulusan yaitu, kesungguhan dari hati dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Dari uraian diatas terdapat indikator-indikator dari dimensi struktur birokrasi yaitu sebagai berikut.

1. Standar operasional prosedur adalah suatu set intruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif.
2. Fragmentasi adalah tersebar nya tanggung jawab kebijakkan kedalam unit-unit organisasi.
3. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah diterapkan tersebut.

5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakkan, kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak

serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 235), menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat terwujud.

Menurut Sunggono (Andita, 2016: 235) implementasi kebijakan mempunyai faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya- sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu biaya atau adana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implentasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berakitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implentasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implentasi. dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatsan-pembatsan yang kurang jelas.

6. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan atau implementasinya didukung oleh sarana –sarana yang memadai. Berkaitan dengan permasalahan atau hambatan dalam implementasi suatu kebijakan , dalam upaya mengatasi hal tersebut penulis menggunakan variabel yang sama seperti halnya variabel yang digunakan dalam faktor penghambat implementasi kebijakan, diantaranya menurut Sunggono (Andita, 2016:41) mengemukakan bahwa.

1. Isi kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

Berdasarkan poin-poin implementasi diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ektern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukan adanya kekurangan –kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan –kekurangan yang menyangkut

sumber daya- sumber daya pembantu misalnya yang menyangkut biaya, waktu dan tenaga manusia.

Dilihat dari uraian diatas maka indikator –indikator dari dimensi isi kebijakan ini adalah.

1. Kejelasan tujuan kebijakan yaitu tujuan kebijakan jelas dan pelaksanaan optimal tanpa adanya hambatan atau masalah.
2. Mengefektifkan sumber daya finansial yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan.
3. Mengefektifkan waktu semaksimal mungkin.
2. Informasi

Implementasi kebijakan publik berasumsi bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada , misalnya karena adanya gangguan komunikasi.

Dilihat dari uraian diatas maka indikator –indikator dari dimensi informasi adalah sebagai berikut.

1. Kejelasan respon pimpinan agar tidak terjadi mis komunikasi.
2. Mengefektifkan sarana sosialisasi sebaik mungkin.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada kelompok sasaran.
3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk melakukan pelaksanaan

kebijakan tersebut baik itu dukungan dari sasaran kebijakan ataupun dari pemerintah.

Dilihat dari uraian diatas maka indikator –indikator dimensi dukungan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan dukungan dari masyarakat.
2. Mengefektifkan fasilitas yang ada.
3. Meningkatkan dukungan dari pemerintah.
4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Dilihat dari uraian diatas maka indikator-indikator dari dimensi pembagian potensi ini adalah sebagai berikut.

1. Menyesuaikan penempatan pekerjaan.
 2. Mengoptimalkan pembagian tugas.
 3. Menyesuaikan beban kerja sesuai kemampuan.
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tahun 2020**

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari senantiasa diatur oleh peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. semua kegiatan warga negara diatur oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. diindonesia terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. keduanya berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. peraturan perundang – undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. dimana peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kondisi pandemi seperti ini para pengguna transportasi sangat rentan tertular penyakit covid-19 maka dari itu mentri perhubungan mengeluarkan peraturan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid-19. Pengendalian transportasi sebagai mana dimaksud dilakukan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat. jika ada pengelola oprasional angkutan umum atau barang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan maka mereka akan mendapatkan sanksi administratif. adapun sanksi administratifnya dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin atau denda administratif.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang posisi dan kelayakan penelitian tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Selain itu dimaksudkan pula untuk

memberikan gambaran tentang perbedaan fokus masalah dan hasil-hasil penelitian. Berikut ini adalah hasil hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggapdarurat Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, Atrin Crisopras Setyowati Universitas Diponogoro, 2017.	Variabel penelitian yakni implementasi kebijakan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan study lapangan seperti observasi, dokumentasi. Metode penelitian kualitatif	Dimensi Dan Indikator Yang Digunakan Berbeda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat keluhan masyarakat mengenai keterlambatan kedatangan tim tanggap darurat. faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah standar dan sasaran serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait. faktor yang menjadi penghambat yaitu kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi , sumberdaya, kondisi politik, kondisi sosial, dan struktur birokrasi.
	Implementasi Program Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang	Variabel Implementasi, Metode Penelitian Kualitatif,	Lokus Penelitian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika	Hasil penelitian menunjukkan implementasi program sosialisasi

	Disusun Oleh: Arit Syarifudin Skrripsi Penelitian Kualitatif Tahun 2018 Stia Sebelas April Sumedang	nik Pengambilan Data Wawancara	Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang.	didinas komunikasi dan informatika persandian dan statistik Kabupaten Sumedang belum terlaksana secara maksimal, karena program belum terlaksana secara rutin, kualitas sumber daya manusianya yang masih belum memadai dan partisipasi dari masyarakat yang masih rendah.
	Implementasi Kualitas Pelayanan Dirumah Sakit Umum Sumedang Disusun Oleh: Kusmana Skrripsi Penelitian Kualitatif Tahun 2017 STIA Sebelas April Sumedang	Variabel Implementasi, Metode Penelitian Kualitatif, Teknik Pengambilan Data Wawancara.	Lokus Penelitian Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang.	Hasil penelitian menunjukan implementasi kualitas pelayanan belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik dalam pelayanan yang baik, pegawai dan perawat belum memahami tujuan organisasi, kurangnya sumber daya seperti tenaga ahli, sarana prasarana serta anggaran.

Berdasarkan uraian diatas maka relevansi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama mengukur tentang implementasi kebijakan publik namun dengan sasaran dan program kebijakan yang berbeda. lebih lanjut peneliti kembangkan melalui pendekatan dan parameter ukur yang

berbeda sehingga penelitian implementasi kebijakan pembatasan sosial di angkutan umum ini secara konsep dan teori masih bersifat orsinil karena variabel dan alat ukur yang diteliti berbeda.

E. Kerangka Penelitian Dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

1. Kerangka Penelitian

Penelitian ini mengukur tentang bagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Di Angkutan Umum Dalam Rangka Pencegahan Covid 19. dapat diimplementasikan di dinas perhubungan kabupaten sumedang. dalam hal ini baik dan buruknya pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran serta para implementor terkait dengan program pembatasan sosial di angkutan umum yang ada untuk itu, di perlukan implementor yang terampil dan didukung dengan sarana dan fasilitas serta materil yang memadai untuk mencapai kebijakan tersebut.

Model implementasi kebijakan menurut Edward III (Winarno, 2012: 177) menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan dalam sebuah program yaitu sebagai berikut:

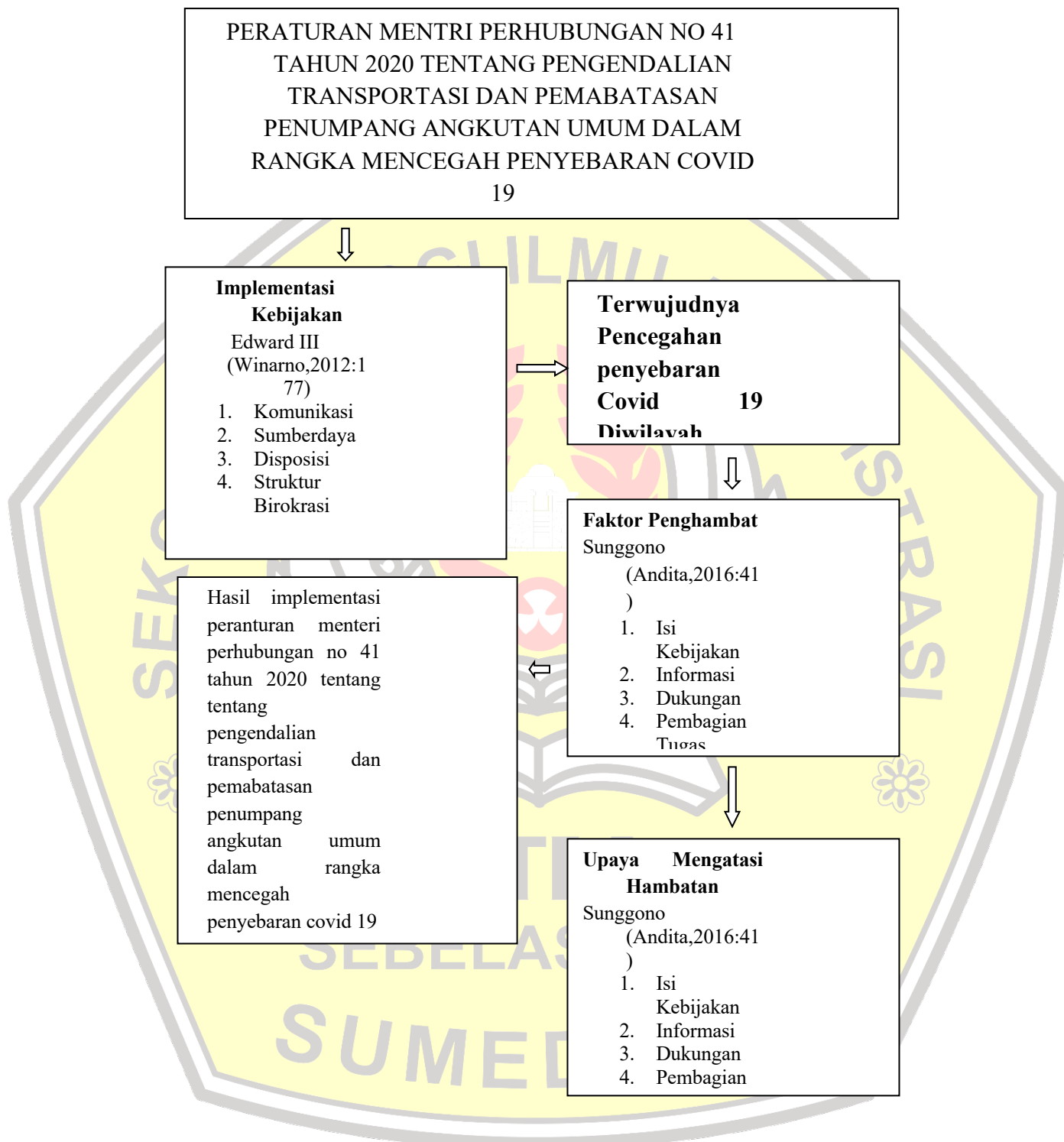
1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Menurut Sunggono (Andita, 2016:41) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

1. Isi kebijakan
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian potensi

Untuk mempermudah memahami kerangka penelitian ini, maka secara sederhana penulis menggambarkan kedalam bagan sebagai berikut.





**Gambar 2.1
Kerangka Penelitian**

2. Kisi Kisi Pertanyaan

Untuk penjelasan selanjutnya, maka peneliti memberikan kisi-kisi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
1	Implementasi Kebijakan Permenhub No 41 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Covid 19, Edward Iii (Winarno,201 2:177)	a. Komunikasi	a. Transmisi	1.
			b. Konsistensi	2.
			c. Kejelasan	3.
		d. Sumber Daya	a. Kompetensi Implementor / Staff	4.
			b. Informasi	5.
			c. Sumberdaya Financial/ Fasilitas	6.
		e. Disposisi	a. Komitmen	7.
			b. Bertanggung Jawab	8.
			c. Ketulusan	9.
		f. Struktur Birokrasi	a. Standard Oprasional Procedure	10.
			b. Fragmentasi	11.
			c. Pengawasan	12.
2	Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Permenhub No 41 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Covid 19, (Andita,2016: 41)	1. Isi Kebijakan	a. Ketidaktepatan tujuan kebijakan	13.
			b. Masih kurangnya sumber daya financial	14.
			c. Masih kurangnya kecukupan waktu	15.
		2. Informasi	a. Masih kurangnya respon pimpinan	16.
			b. Masih kurangnya ketepatan waktu	17.
			c. Masih kurang akuratnya penyampaian informasi	18.
		3. Dukungan	a. Masih kurangnya dukungan masyarakat	19.

3	Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi kebijakan permenhub no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah covid 19, (Andita,2016: 41)		b. Masih kurangnya fasilitas	20.
			c. Masih kurangnya dukungan dari pemerintah	21.
		4. Pembagian Potensi	a. Ketidak sesuaian penempatan pekerjaan	22.
			b. Masih kurangnya kesesuaian dalam pembagian tugas	23.
			c. ketidaksesuaian beban kerja yang diberikan	24
		1. Isi Kebijakan	a. Kejelasan tujuan kebijakan	25
			b. Mengefektifkan sumber daya financial yang ada	26
			c. Mengefektifkan waktu semaksimal mungkin	27
		2. Informasi	a. Kejelasan respon pimpinan	28
			b. Mengefektifkan waktu sebaik mungkin	29
			c. Meningkatkan sosialisasi kepada kelompok sasaran	30
		3. Dukungan	a. Meningkatkan dukungan dari masyarakat	31
			b. Mengefektifkan fasilitas yang ada	32
			c. Meningkatkan dukungan dari pemerintah	33
		4. Pembagian Potensi	a. Menyesuaikan penempatan pekerjaan	34
			b. Mengoptimalkan pembagian tugas	35
			c. Menyesuaikan beban kerja	36

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Pengertian metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020: 2) sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun metode penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Dukeshire & Thurlow dalam Sugiyono (2020: 3) mengemukakan bahwa:

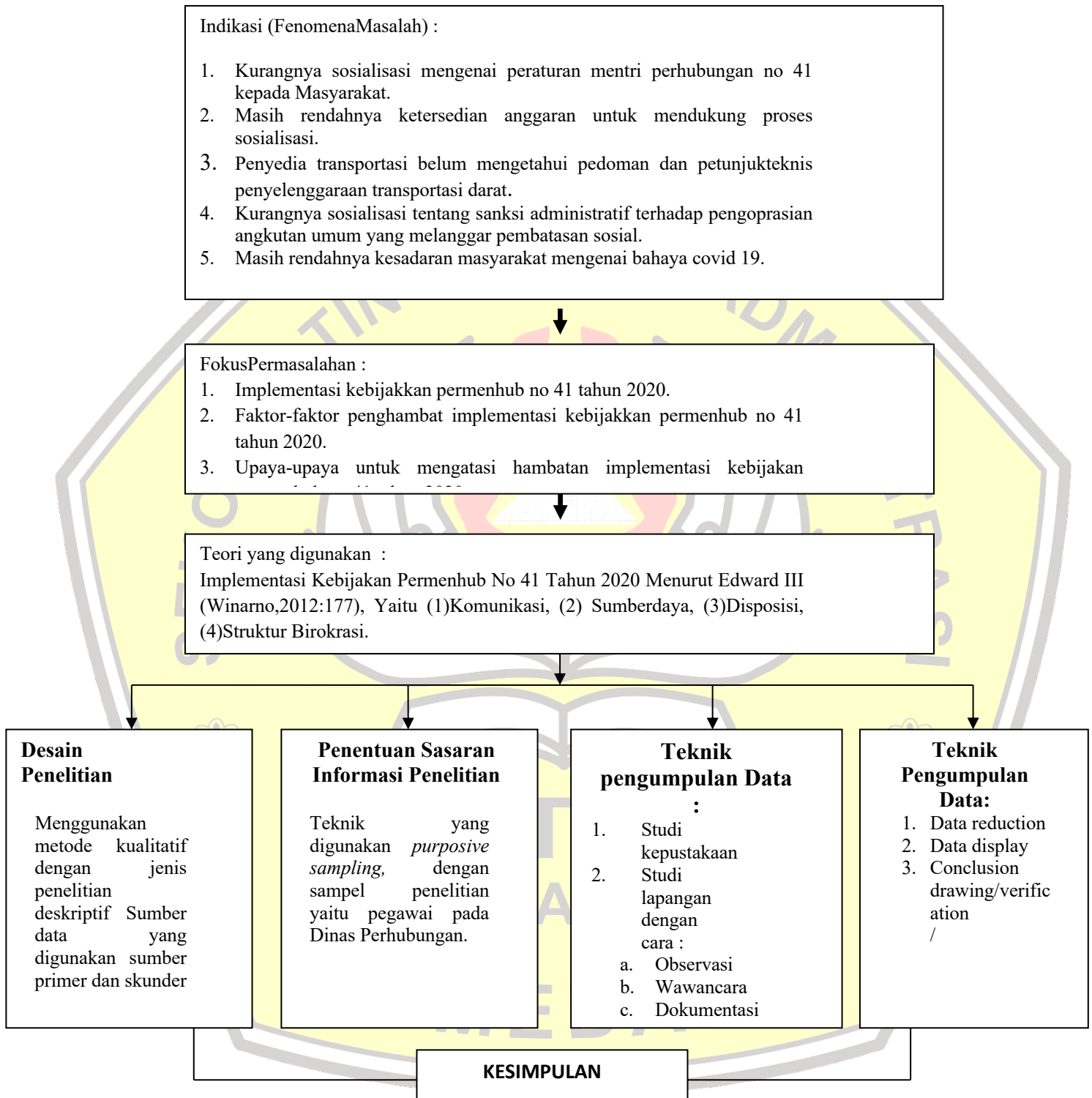
Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan focus grup, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data.

Menurut William dalam Moleong (2011: 5) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada satu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada unsure

manusia sebagai instrument penelitiannya dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Selain itu peneliti akan menggambarkan alur desain penelitian kualitatif pada gambar dibawah ini:





Gambar 3.1
Desain Penelitian

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

1. Penentuan Sasaran

Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditemukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi oleh Spradley (Sugiyono, 2020: 91) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumedang berjumlah 64 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Penelitian

No	Unsur	Jumlah Orang
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	12
3	Bidang Angkutan	8
4	Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	6
5	Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5

6	Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	13
7	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	9
8	UPT Terminal Wado	6
9	UPT Penerangan jalan Umum	4
	Jumlah	64

2. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020: 54). Artinya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan Implementasi kebijakan tersebut. Pegawai yang dijadikan sampel informan penelitian di karenakan peneliti beranggapan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggungjawab mengenai proses kebijakan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19 Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

Maka, yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala dinas, kesekretariatan, Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, Kasi Bidang Angkutan, dan pengemudi angkutan umum yang ada di kabupaten sumedang. Maka seluruhnya berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Orang
1	a Dinas	1
2	Sekretariat	1
3	Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	1
4	Bidang Angkutan	1
5	Pengemudi Angkutan Umum	1
	Jumlah	5

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan peneliti melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi lapangan

a. Observasi, merupakan “teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan seperti pada saat bagaimana cara mereka melaksanakan kebijakan”

b. Wawancara, merupakan hal bagian penting dari setiap objek penelitian tindakan karena menyajikan kesempatan kepada peneliti untuk menelaahnya lebih lanjut, memecahkan masalah dan untuk mengumpulkan data yang belum diperoleh dengan cara lainnya.

- c. Dokumentasi, merupakan penyimpulan data yang mengkaji dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

D. Prosedur Pengolahan Data

Untuk mengolah data dari hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis dan Model Mailes dan Huberman (Sugiyono, 2020: 246). Adapun prosedur pengolahan data hasil penelitian sesuai dengan teknik analisis data Model Mailes dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan padahal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data display* (penyajian data)

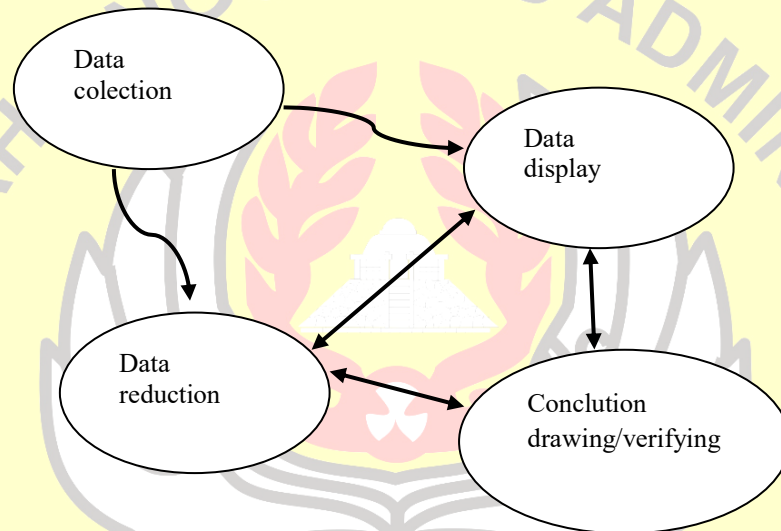
Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclution drawing verification* (Pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan merupakan rumusan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau

gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis data tersebut di atas menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020: 134) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.2
Prosedur Pengolahan Data
Sumber : Sugiyono, 2020

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV (empat) sebelumnya mengenai implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang sudah dapat dikatakan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya sempurna. Yang pertama sumber daya yang masih kurang memadai, diantaranya kurangnya pegawai, anggaran yang belum cukup memadai, begitupun dengan masih kurangnya respon dan dukungan dari masyarakat.
2. Implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang diukur berdasarkan teori Edward III.

3. Hambatan dalam implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang tidak begitu signifikan hanya sebatas Yang pertama sumber daya yang masih kurang memadai, diantaranya kurangnya pegawai, anggaran yang belum cukup memadai, begitupun dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara maksimal. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah covid 19 yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang yaitu

- a. Kurangnya kuantitas pegawai,
- b. Anggaran yang belum cukup memadai,
- c. Kurangnya respon dan dukungan dari masyarakat.

4. Untuk mengatasi hambatan yang ada. Selaku pelaksana kebijakan seharusnya dapat memberikan pemahaman serta mensosialisasikan program secara maksimal serta melakukan pembinaan secara berulang-ulang agar dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugasnya masing-masing adapun upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Kurangnya pegawai dapat diatasi dengan meningkatkan kompetensi para tiap individu agar pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh dua orang bisa dilakukan oleh satu orang.
- b. Anggaran yang belum cukup memadai dapat diatasi dengan menggandeng pihak pihak swasta atau instansi pemerintah-pemerintah yang lain untuk ikut berkontribusi.
- c. Kurangnya dukungan dan respon dari masyarakat dapat diatasi dengan memberikan edukasi tentang bahaya covid 19 agar masyarakat lebih patuh dan mengindahkan kebijakan tersebut.

b. Saran

Pada akhirnya peneliti menuliskan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Agar proses sosialisasi berhasil dan sampai kepada kelompok sasaran seperti masyarakat dan khususnya sopir angkutan umum maka selain sosialisasi dengan menggunakan media sosial alangkah lebih baiknya pihak dinas perhubungan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada seluruh sopir angkutan umum yang ada di wilayah kabupaten sumedang.
2. Agar proses pelaksanaan kebijakan tidak terkendala dalam masalah anggaran yang kurang dari pemerintah maka sebaiknya pihak dinas perhubungan harus mampu menggandeng dan melakukan

kerjasama dengan dinas, instansi atau perusahaan swasta lainnya supaya anggaran terpenuhi dan implementasi kebijakan berjalan dengan lancar.

3. Agar pelaksanaan implementasi kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat maka selain kuantitas pegawai yang ditingkatkan ,kualitas pegawai juga harus ditingkatkan untuk meminimalisir kegagalan sosialisasi karena kurangnya kompetensi pegawai dalam menyampaikan bahaya covid 19 kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Anggara, Sahaya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Fhatoni, Abdurrahmat. 2009. *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Gie, The Liang. 2016. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Handani dan Frinaldi. 2020. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri Di Kota Padang*. 2(3), 78. Dikutip dalam: <http://jmiap.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/181/100> Diakses pada 02 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik* Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro.
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufiz, Ali. 2011. *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Karunika.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2020. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset.

STIA Sebelas April Sumedang. 2021. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.

Subarsono. 2004. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Administrasi Metode R&D*. Bandung: Alfabeta

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Taufiqurokman. 2014. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Wahab, Abdul. 2017. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Andita, Wenny. 2016. *Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 1 Lagaligo Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Hasanudin.

Crisopras Setyowati, Atrin .2017. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggapdarurat Bencana Tanah Longsor Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang*, Universitas Diponogoro.

Syarifudin, arif .2018. *Implementasi Program Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang: Skripsi Penelitian Kualitatif : STIA Sebelas April Sumedang*.

Sudrajat, A. R., Pranawati, N. W., & Sawitri, N. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM SATU ARAH PADA RUAS JALAN MAYOR ABDURAHMAN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(1), 106-116. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/73>

Kusmana. 2017. *Implementasi Kualitas Pelayanan Dirumah Sakit Umum Sumedang : Skripsi Penelitian Kualitatif : STIA Sebelas April Sumedang*.

A. DOKUMENTASI

1. Peraturan Menteri Perhubungan No 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid 19
2. Peraturan Bupati Sumedang No 40 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019
3. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.

